



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 04 TAHUN 2009

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang ;
- b. bahwa untuk optimalisasi pembiayaan perjalanan dinas Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur maka dipandang perlu untuk mengatur besaran biaya perjalanan dinas ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 04) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 07 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 09 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 09);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 01);

15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

Pasal 1

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama-sama yang jaraknya paling dekat 5 (lima) Km dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara dan atau Daerah sesuai perintah Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan satuan kerjanya.
- (3) Tempat kedudukan adalah tempat /kota kantor/satuan kerja berada.
- (4) Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
- (5) Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
- (6) Dalam Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keterangan Dokter/Rujukan penguji kesehatan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk.

Pasal 2

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal.
 - b. Biaya penginapan.
 - c. Uang representase.
 - d. Biaya transport .
- (2) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas kecuali pada huruf c.
- (3) Besaran biaya Perjalanan Dinas Pegawai Kontrak lainnya sebagaimana tercantum pada lampiran 5 peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, b dan c dan ayat 2 dan 3 dibayarkan secara lumpsom sebelum melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan transportasi laut dan udara sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 huruf d dibayarkan secara Real (add cost), namun dapat dipanjarkan sebelum berangkat melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini.
- (3) Biaya lumpsom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lama 3 (tiga) hari di luar wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan paling lama 5 (lima) hari di luar wilayah Propinsi Sulawesi Selatan kecuali ditentukan lain

setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang yang besarnya sebagaimana tercantum pada lampiran 1 dan 2 Peraturan ini.

- (4) Perjalanan dinas jabatan pergi dan pulang ke Kabupaten Luwu, Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian dan biaya transportasi dibayarkan secara lumpsum yang besarnya sebagaimana tersebut dalam lampiran 4 Peraturan ini.

Pasal 4

Biaya perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Pejabat Eselon II, Eselon III Pimpinan SKPD dan Eselon III pada SKPD yang secara nyata menggunakan fasilitas kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM).

Pasal 5

- (1) Penggunaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan biaya BBM berdasarkan jarak yang ditempuh dari tempat kedudukan ketempat yang dituju (Pergi — Pulang) di luar wilayah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tersebut pada lampiran 3 peraturan ini.
- (2) Standar nilai BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan perbandingan jarak dan kapasitas kendaraan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Roda 4 sampai dengan 1.500 CC 1 Liter jarak tempuh 7 (tujuh) Km;
 - b. Kendaraan Roda 4 sampai dengan 1.800 CC 1 Liter jarak tempuh 6 (enam) Km;
 - c. Kendaraan Roda 4 sampai dengan 2.000 CC 1 Liter jarak tempuh 5 (lima) Km;
 - d. Kendaraan Roda 4 sampai dengan 3.200CC 1 Liter jarak tempuh 4 (empat) Km;
- (3) Standar nilai BBM untuk Kendaraan Roda 2 besarnya seperti pada lampiran 3 peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas dalam wilayah Kerja Kabupaten Luwu Timur ditetapkan 1 (satu) hari kecuali ada hal yang ditentukan lain atas persetujuan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan Dinas dalam wilayah kerja kecamatan bagi pegawai SKPD Kecamatan dan Puskesmas satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana tersebut dalam lampiran 4 Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan Surat Tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dan atau pejabat yang diberi wewenang, setelah mendapat persetujuan prinsip.
- (2) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Perjalanan Dinas keluar Kab. Luwu Timur, untuk pejabat Eselon II dan Eselon III kepala SKPD dengan persetujuan prinsip oleh Bupati.
 - b. Perjalanan Dinas keluar wilayah Kabupaten Luwu Timur, untuk pejabat Eselon III dan IV persetujuan prinsip oleh Kepala SKPD.
 - c. Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur persetujuan prinsip pejabat satu tingkat di atasnya dan pimpinan SKPD bagi staf yang dipimpinnya.

Pasal 8

- (1) Uang harian diberikan sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Biaya transport pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Luwu Timur selain yang diatur dalam Pasal 4, diberikan biaya transport kendaraan umum dan dibayarkan secara lumpsum bersama dengan uang harian sebelum berangkat.

- (3) Biaya penginapan hanya diberikan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Luwu Timur dan dibayarkan kurang 1 (satu) hari dari jumlah hari perjalanan dinas yang ditentukan yang besarnya sebagaimana tersebut dalam lampiran 2 peraturan ini.
- (4) Satuan biaya tiket pesawat yang dapat di panjarkan bagi yang melaksanakan perjalanan dinas dalam Propinsi dan ke luar Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum pada lampiran 6 Peraturan ini.

Pasal 9

Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti seminar, workshop, bimtek, lokakarya dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi biaya pelaksanaan, tidak diberikan uang makan dan biaya penginapan menurut jumlah hari pelaksanaan.

Pasal 10

- (1) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini tidak berlaku untuk Perjalanan Dinas/Pejabat ke luar Negeri, Perjalanan Pindah tugas dan Biaya Pemulangan Pegawai yang Pensiun.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan ini tidak berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Ketentuan biaya perjalanan dinas ke luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASSET DAERAH
PEMKAS LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
KA. DINAS	<i>[Signature]</i>
KABID / SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Diundangkan di Malili
pada tanggal 17 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 Maret 2009

BUPATI LUWU TIMUR

[Signature]
H. ANDI HATTA M

H.A.T UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 04

Lampiran 1 Peraturan Bupati Luwu Timur

Nomor : 04 Tahun 2009

Tanggal : 17 Maret 2009

**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI
SESUAI DAERAH TUJUAN**

NO.	DAERAH TUJUAN	TARIF/TAXI	UANG HARIAN			JUMLAH
			MAKAN	TRANSPORT LOKAL	SAKU	
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	90,000	100,000	100,000	100,000	390,000.00
2	SUMATERA UTARA	65,000	100,000	100,000	100,000	365,000.00
3	RIAU	55,000	100,000	100,000	100,000	355,000.00
4	KEPULAUAN RIAU / BATAM	65,000	100,000	100,000	100,000	365,000.00
5	JAMBI	55,000	100,000	100,000	100,000	355,000.00
6	SUMATERA BARAT	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000.00
7	SUMATERA SELATAN	85,000	100,000	100,000	100,000	385,000.00
8	LAMPUNG	95,000	100,000	100,000	100,000	395,000.00
9	BENGKULU	65,000	100,000	100,000	100,000	365,000.00
10	BANGKA BELITUNG	65,000	100,000	100,000	100,000	365,000.00
11	BANTEN	220,000	100,000	100,000	100,000	520,000.00
12	JAWA BARAT	45,000	100,000	150,000	100,000	395,000.00
13	D.K.I. JAKARTA	140,000	150,000	200,000	100,000	590,000.00
14	JAWA TENGAH	40,000	100,000	100,000	100,000	340,000.00
15	D.I. YOKYAKARTA	50,000	100,000	150,000	100,000	400,000.00
16	JAWA TIMUR	85,000	100,000	150,000	100,000	435,000.00
17	BALI	85,000	150,000	150,000	100,000	485,000.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	80,000	100,000	150,000	100,000	430,000.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	110,000	100,000	100,000	100,000	410,000.00
20	KALIMANTAN BARAT	80,000	100,000	100,000	100,000	380,000.00
21	KALIMANTAN TENGAH	65,000	100,000	100,000	100,000	365,000.00
22	KALIMANTAN SELATAN	90,000	100,000	100,000	100,000	390,000.00
23	KALIMANTAN TIMUR	270,000	100,000	150,000	100,000	620,000.00
24	SULAWESI UTARA	80,000	100,000	100,000	100,000	380,000.00
25	GORONTALO	220,000	100,000	100,000	100,000	520,000.00
26	SULAWESI BARAT	65,000	100,000	100,000	100,000	365,000.00
27	KAB/KOTA DALAM WILAYAH SUL-SEL KECUALI KAB.LUWU,KOTA PALOPO & KAB.LUWU UTARA	95,000	100,000	150,000	100,000	445,000.00
28	SULAWESI TENGAH	35,000	100,000	100,000	100,000	335,000.00
29	SULAWESI TENGGARA	90,000	100,000	100,000	100,000	390,000.00
30	MALUKU	165,000	100,000	100,000	100,000	465,000.00
31	MALUKU UTARA	110,000	100,000	100,000	100,000	410,000.00
32	PAPUA	820,000	150,000	200,000	100,000	1,270,000.00
33	IRIAN JAYABARAT	110,000	150,000	150,000	100,000	510,000.00

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASSET DAERAH
PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
DA	<i>[Signature]</i>
K.A. DINAS	<i>[Signature]</i>
KETIDAK/SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KATUNDAK/KELOMPOK	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
H. ANDI HATTA M.

Lampiran 2 Peraturan Bupati Luwu Timur
 Nomor : 04 Tahun 2009
 Tanggal : 17 Maret 2009

A. STANDAR BIAYA PENGINAPAN

DAERAH TUJUAN	BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN & ANGGOTA DPRD & ESELON II	ESELON III	ESELON IV	STAF & PTT
	Bintang Empat	Bintang Tiga	Bintang Dua	Bintang Satu
NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1,100,000	750,000	350,000	250,000
SUMATERA UTARA	900,000	550,000	300,000	240,000
R I A U	850,000	665,000	330,000	240,000
KEPULAUAN RIAU	610,000	500,000	250,000	180,000
J A M B I	950,000	560,000	275,000	200,000
SUMATERA BARAT	850,000	550,000	330,000	275,000
SUMATERA SELATAN	890,000	400,000	350,000	250,000
LAMPUNG	620,000	560,000	330,000	250,000
BENGKULU	450,000	420,000	380,000	220,000
BANGKA BELITUNG	475,000	430,000	300,000	210,000
BANTEN	1,100,000	700,000	420,000	280,000
JAWA BARAT	1,200,000	645,000	430,000	300,000
D.K.I. JAKARTA	850,000	610,000	450,000	350,000
JAWA TENGAH	860,000	750,000	390,000	280,000
D.I. YOKYAKARTA	750,000	510,000	350,000	225,000
JAWA TIMUR	850,000	500,000	380,000	275,000
BALI	1,200,000	930,000	750,000	450,000
NUSA TENGGARA BARAT	650,000	450,000	350,000	200,000
NUSA TENGGARA TIMUR	550,000	410,000	325,000	220,000
KALIMANTAN BARAT	550,000	500,000	310,000	220,000
KALIMANTAN TENGAH	550,000	380,000	290,000	230,000
KALIMANTAN SELATAN	750,000	550,000	340,000	220,000
KALIMANTAN TIMUR	1,200,000	560,000	380,000	275,000
SULAWESI UTARA	650,000	560,000	425,000	220,000
GORONTALO	820,000	650,000	360,000	165,000
SULAWESI BARAT	550,000	410,000	330,000	165,000
SULAWESI SELATAN	750,000	650,000	400,000	275,000
SULAWESI TENGAH	550,000	440,000	330,000	195,000
SULAWESI TENGGARA	550,000	440,000	385,000	250,000
MALUKU	600,000	450,000	240,000	165,000
MALUKU UTARA	480,000	360,000	320,000	190,000
P A P U A	950,000	450,000	375,000	275,000
IRIAN JAYABARAT	920,000	900,000	330,000	290,000
BELOPA	-	400,000	300,000	250,000
PALOPO	-	400,000	300,000	250,000
MASAMBA	-	300,000	250,000	200,000

B. UANG REPRESENTASE PERHARI

1	BUPATI / WAKIL BUPATI	200,000
2	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD / ESELON II	100,000

STEMPEL PARAF KOORDINASI

DINAS PENDAPATAN / PENGELOLAAN KEUANGAN ASSET DAERAH
 PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	
DA	
DINAS	
DISEKRETARIS	
SEKRETARIS	

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M.

Lampiran 3 Peraturan Bupati Luwu Timur

Nomor : 04 Tahun 2009

Tanggal : 17 Maret 2009

**TABEL JARAK KILOMETER DAN JUMLAH PEMAKAIAN BBM
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL**

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA/KE CAMATAN	JARAK (KM)	PP (KM)	Motor	s/d 1.500 cc	s/d 1.800 cc	s/d 2.000 cc	s/d 3.200 cc
					(Liter)	(Liter)	(Liter)	(Liter)
1		3	4		5	6	7	8
1	BURAU	65 KM	130	7	19	22	26	33
2	WOTU	48 KM	96	6	14	16	19	24
3	TOMONI	49 KM	98	6	14	16	20	25
4	MANGKUTANA	50 KM	100	6	14	17	20	25
5	ANGKONA	32 KM	64	5	9	11	13	16
6	NUHA	57 KM	114	7	16	19	23	29
7	TOWUTI	52 KM	104	6	15	17	21	26
8	KALAENA	60 KM	120	7	17	20	24	30
9	TOMONI TIMUR	39 KM	78	5	11	13	16	20
10	WASUPONDA	35 KM	70	5	10	12	14	18
11	MALILI (RADIUS 5 KM)	-	-	2	5	6	8	10
12	MAKASSAR	623 KM	1,246		178	208	249	312
13	MAROS	593 KM	1,186		169	198	237	297
14	PANGKEP	571 KM	1,142		163	190	228	286
15	BARRU	468 KM	936		134	156	187	234
16	PARE-PARE	418 KM	836		119	139	167	209
17	PINRANG	395 KM	790		113	132	158	198
18	SIDRAP	380 KM	760		109	127	152	190
19	SENGKANG	358 KM	716		102	119	143	179
20	SOPPENG	506 KM	1,012		145	169	202	253
21	BONE	428 KM	856		122	143	171	214
22	SINJAI	498 KM	996		142	166	199	249
23	GOWA	585 KM	1,170		167	195	234	293
24	TAKALAR	667 KM	1,334		191	222	267	334
25	JENNEPONTO	620 KM	1,240		177	207	248	310
26	BANTAENG	560 KM	1,120		160	187	224	280
27	BULUKUMBA	560 KM	1,120		160	187	224	280
28	SELAYAR	627 KM	1,254		179	209	251	314
29	TATOR	264 KM	528		75	88	106	132
30	ENREKANG	320 KM	640		91	107	128	160
31	MASAMBA	120 KM	240		31	40	48	60
32	KOTA PALOPO	184 KM	368		53	61	74	92
33	BELOPA	244 KM	488		70	81	98	122
34	KOLAKA (SULTRA)	520 KM	1,040		149	173	208	260
35	POSO, MOROWALI	620 KM	1,240		149	173	208	260
36	BUNGKU (SULTENG)							
	MAMUJU (SULBAR)	570 KM	1,140		163	190	228	285

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASSET DAERAH
PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
KA. DINAS	
KABID / SEKRETARIS	
KASUBID / KASUBAG.	

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M.

Lampiran 4 Peraturan Bupati Luwu Timur
 Nomor : 04 Tahun 2009
 Tanggal : 17 Maret 2009

A. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	URAIAN	LUMP SUM/HARI							
		ZONA I		ZONA II		ZONA III		ZONA V	
		KEC. BURAU, WOTU, TOMONI, MANGKUTANA, KALAENA, NUHA, TOWUTI		KEC. TOMONI TIMUR, ANGKONA, WASPONDA		KEC. TOWUTI DAN KEC. NUHA, KEC. WASUPONDA (SEBERANG DANA U)		KEC. MALILI (RADIUS 5 Km BATAS KOTA)	
		Transportasi	Uang Harian	Transportasi	Uang Harian	Transportasi	Uang Harian	Transportasi	Uang Harian
1	BUPATI & KETUA DPRD		300,000		250,000		250,000		200,000
2	WAKIL BUPATI & WAKIL KETUA DPRD		250,000		225,000		225,000		150,000
3	ESELON II & ANGGOTA DPRD		225,000		200,000		200,000		125,000
5	ESELON III	40,000	150,000	40,000	135,000	45,000	135,000	15,000	100,000
6	ESELON IV	40,000	135,000	40,000	120,000	45,000	120,000	15,000	75,000
7	STAF & PTT	40,000	110,000	40,000	105,000	45,000	105,000	15,000	50,000
8	KENDARAAN AIR					1,000,000			

B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH SETIAP KECAMATAN

NO	URAIAN	LUMP SUM/HARI		
		ZONA I	ZONA II	ZONA III
		KEC. BURAU, WOTU, TOMONI, MANGKUTANA, KALAENA, NUHA, TOWUTI, TOMONI TIMUR, ANGKONA, WASPONDA.	KEC. TOWUTI (DESA LOREHA)	KEC. MALILI (RADIUS 5 Km BATAS KOTA)
1	CAMAT		50,000	50,000
2	SEKCAM/KA. PUSKESMAS		35,000	40,000
3	KASI/KASUBAG		30,000	30,000
4	STAF/PTT & STAF PUSKESMAS		25,000	25,000

C. LUMP SUM UANG HARIAN KE KAB.LUWU,KOTA PALOPO,DAN KAB.LUWU UTARA

NO	URAIAN	LUWU	PALOPO	LUWU UTARA
1	BUPATI/KETUA DPRD	350,000	325,000	300,000
2	WAKIL BUPATI/WAKIL KETUA DPRD	300,000	275,000	250,000
3	ESELON II / ANGGOTA DPRD	275,000	250,000	225,000
4	ESELON III	250,000	225,000	200,000
5	ESELON IV	225,000	200,000	175,000
6	STAF	200,000	175,000	150,000
7	TRANSPORT UMUM	65,000	40,000	30,000

STEMPEL CARA KOORDINASI
 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH
 PEMKAB. LUWU

DAFTAR DIPERIKSA
 l. l. l.
 l. l. l.
 l. l. l.

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M.

Lampiran 5 Peraturan Bupati Luwu Timur
Nomor : 04 Tahun 2009
Tanggal : 17 Maret 2009

**TENAGA KONTRAK LAINNYA DAN SOPIR (PENGEMUDI)
PER HARI**

1	DALAM DAERAH	50,000
2	LUAR DAERAH DALAM PROPINSI	150,000

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASSET DAERAH
PEMKAB. LUWU TIMUR

TILAH DIPERIKSA	PARAF
DA	h.
KABID / SEKRETARIS	h.
KASUBID / KASUBAG.	h.

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M.

Lampiran 6 Peraturan Bupati Luwu Timur
 Nomor : 04 Tahun 2009
 Tanggal : 17 Maret 2009

A. STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG DAPAT DIPANJARKAN

NO.	TUJUAN	BIAYA TIKET
1	2	3
1	JAKARTA DAN JAWA BARAT	1,500,000
2	JOGJAKARTA DAN JAWA TENGAH	1,250,000
3	SURABAYA DAN WILAYAH LAINNYA BALI, NTT DAN NTB	1,000,000
4	PALU WILAYAH SULAWESI TENGAH LAINNYA DAN KENDARI	750,000
5	MANADO DAN GORONTALO	1,300,000
6	AMBON DAN SEKITARNYA	1,250,000
7	JAYAPURA DAN WILAYAH IRIAN LAINNYA	2,500,000
8	WILAYAH KALIMANTAN	850,000
9	MEDAN DAN WILAYAH SUMATRA UTARA LAINNYA	2,700,000
10	PADANG, RIAU, BATAM DAN WILAYAH SUMATRA BARAT LAINNYA	1,750,000
11	PALEMBANG DAN WILAYAH SUMATRA SELATAN LAINNYA	1,850,000
12	DAERAH ISTIMEWA ACEH	3,000,000
13	SOROAKO-MAKASSAR	900,000

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASSET DAERAH
 PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
DA	h.
P.A. DINAS	h.
KABID/SEKRETARIS	Alamtrini
KASUBID/KASISTEM	Desere-Ang

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M.